

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adrian Sutedi. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor, Indonesia: Ghalia Indonesia. hlm. 7
- Agustino Ferdinand. 2008. *Pengantar Kebijakan Negara*. Jakarta, Indonesia: Bina Cipta. hlm. 3
- Andi Hamzah. 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Indonesia: Ghalia Indonesia, hlm. 74.
- Barda Nawawi Arief, 2017 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Indonesia: Prenadamedia Group, hlm. 18–19.
- Boediono. 2001. *Perpajakan Indonesia*. Diadit Media. Jakarta. hlm 14
- Heru lesmono. 2002. *Identifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Lkis. hlm. 19
- Ida Zuraida. 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika. hlm 85.
- Juli Panglima Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm 65
- Marihot Pahala Siahaan. 2015. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta, Indonesia: Graha ilmu. hlm. 37
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 54
- Munawir. 1995. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta, Indonesia: Liberty. hlm. 149
- Riawan Tjandra. 2013. *Hukum Keuangan Negara*. Grasindo. Jakarta. hlm 112
- R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Indonesia: Politeia, hlm. 10
- Siahaan. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers. hlm. 20

Soerjono Soekanto. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.52

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 7

Winarmo. Surackhmad. 1998. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung : Transito. hlm 139

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2001. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta. hlm 6

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Pemotongan Hewan, Pasal 25 ayat (1). Tentang pemeriksaan dan pemotongan hewan ternak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 17.